

Kerjasama Pariwisata Lampung-Australia: Peluang dan Tantangan

Rahayu Lestari¹, Tety Rachmawati²

¹Dosen Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia, rahayu.lestari@fisip.unila.ac.id

²Dosen Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia, tety.rachmawati@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Potensi pariwisata Lampung yang tinggi perlu mendapat perhatian dan prioritas untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata. Rata-rata wisatawan mancanegara yang datang ke Lampung berasal dari Australia dan Belanda, yang tertarik dengan objek wisata Surfing di Pulau Pisang. Selain objek wisata pantai bergelombang tinggi untuk surfing, wisman juga menggemari kunjungan wisata ke Taman Nasional Way Kambas dan wisata iconic Gunung Anak Krakatau. Data kunjungan wisatawan tahun 2018 menunjukkan minat wisatawan asing yang tinggi terhadap objek wisata pantai dan alam di Lampung. Akan tetapi potensi pariwisata tersebut belum optimal mengingat belum diprioritaskannya sektor pariwisata sebagai salah satu sektor strategis yang dapat menyokong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam inisiasi kerjasama Pariwisata antara Lampung dan Australia, guna meningkatkan daya saing dan optimalisasi sektor pariwisata daerah Lampung sebagai salah satu sumber aktifitas ekonomi masyarakat. Data didapatkan dengan menggunakan studi literasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menemukan hambatan tata kelola dan tantangan yang dihadapi dalam inisiasi kerjasama Lampung-Australia di sektor Pariwisata baik dari internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Lampung-Australia Cooperation, Paradiplomasi Lampung, Kerjasama Pariwisata, Pariwisata Lampung

Abstract

Lampung's high tourism potential needs attention and priority to increase the competitiveness of tourist destinations. On average, foreign tourists who come to Lampung come from Australia and the Netherlands, who are interested in the surfing tourist attraction on Pulau Pisang. Apart from being a tourist attraction with high waves for surfing, foreign tourists are also fond of visiting the Way Kambas National Park and the iconic tour of Mount Anak Krakatau. Data on tourist visits for 2018 shows a high interest of foreign tourists in beach and natural attractions in Lampung. However, the tourism potential is not yet optimal considering the tourism sector has not been prioritized as one of the strategic sectors that can support the improvement of people's welfare. This study aims to explore opportunities and challenges in initiating tourism cooperation between Lampung and Australia, in order to increase competitiveness and optimize the tourism sector in the Lampung region as a source of community economic activity. Data were obtained using literacy studies and interviews. The results of this research found governance obstacles and challenges faced in the initiation of the Lampung-Australia cooperation in the Tourism sector both internally and externally.

Keywords: Lampung-Australia Cooperation, Lampung Paradiplomacy, Tourism Cooperation, Lampung Tourism

I. Pendahuluan

Data kunjungan wisatawan tahun 2018 menunjukkan minat wisatawan asing yang tinggi terhadap objek wisata pantai dan alam di Lampung. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut hingga mencapai 58 % pada tahun 2017, dari angka 155 ribu pada tahun 2016, menjadi 245 ribu pada tahun 2017. Meskipun saat pandemi Covid-19 terutama pada tahun 2020, secara umum pergerakan wisata di Lampung hanya mencapai 2 juta orang, berbeda jauh dari setahun sebelum Covid-19 dimana pergerakan wisata di Lampung dapat mencapai 12 juta orang (Handoko, 2021). Data per tahun 2021 diketahui jumlah wisatawan domestik ke Provinsi Lampung pada kisaran 2,7 juta jiwa, sementara wisatawan mancanegara sebanyak 4.141 jiwa (Khoiriah, 2023). Rata-rata wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Lampung berasal dari Australia dan Belanda, yang tertarik dengan objek wisata Surfing di Pulau Pisang. Selain objek wisata pantai bergelombang tinggi untuk surfing, wisman juga menggemari kunjungan wisata ke Taman Nasional Way Kambas dan wisata iconic Gunung Anak Krakatau.

Potensi pariwisata Lampung ditunjukkan dengan terpenuhinya 4 (empat) komponen suplai pariwisata yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan pariwisata, infrastruktur pariwisata, sektor operasional lain yang mendukung, dan faktor hospitaliti (Lestari et al., 2021). Selain memiliki potensi geografis yang memadai, dengan banyak destinasi wisata pantai dan pulau, Lampung juga memiliki banyak atraksi pariwisata alam yang indah, serta potensi budaya yang kuat yang dikenal sebagai “*pi’ il pesenggiri*”. Kondisi infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran mobilitas wisata, yakni ketersediaan bandara internasional dan pelabuhan. Kondisi alam Lampung dengan sumber daya pantainya sangat memungkinkan terciptanya destinasi wisata pantai yang berkelanjutan. Terutama apabila dapat didorong sinergi dan integrasi antar pelaku wisata, baik antara pemerintah, komunitas atau masyarakat lokal, pelaku bisnis, dan berbagai elemen lain. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, maka semakin efektif dan optimal penyelenggaraan pariwisata yang berkelanjutan (Susana et al., 2017). Sebagaimana keberhasilan pengelolaan wisata pantai yang melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat, contohnya adalah pengembangan wisata pantai di Pulau Pahawang, Pesawaran (Susana et al., 2017).

Salah satu wisata pantai potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi bagi wisatawan asing adalah Kawasan Pantai Pesisir Barat dan Kawasan Pantai Teluk Lampung. Jumlah wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017 mencapai 135.833 orang, terdiri dari wisatawan asing sebanyak 31.377 orang dan wisatawan domestik sebanyak 104.456 orang (BPS Pesisir Barat, 2018). Wisatawan mancanegara banyak menuju destinasi wisata tersebut dikarenakan pantai bergelombang tinggi, yang dapat dimanfaatkan sebagai areal surfing, dan diving karena memiliki panorama bawah laut yang indah. Selain Pantai Tanjung Setia, ada beberapa pantai lain yang biasanya diminati para wisatawan untuk melakukan surfing diantaranya Pantai Way Jambu, Pantai Karang Nyibor, dan Pantai Labuhan Jukung (Travel Tempo: 2018).

Potensi pariwisata Lampung yang tinggi perlu mendapat perhatian dan prioritas untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata. Pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan harus dapat mengatasi hambatan seputar aspek sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada (Lestari et al., 2021). Mengingat sektor pariwisata memiliki kontribusi yang penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik ditinjau secara parsial maupun secara menyeluruh berdasarkan agregat jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel sebagai elemen hospitaliti, dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah (Umi Zakiah, 2019). Salah satu strategi untuk memacu peningkatan daya saing sektor pariwisata adalah dengan menginisiasi adanya kerjasama daerah (sub-nasional) dengan negara lain, terutama guna meningkatkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata potensial. Inisiasi kerjasama tersebut dapat dimulai

dengan melakukan peninjauan kerjasama kepada negara yang telah menjalin hubungan dengan daerah Lampung, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk melakukan peninjauan perlu dilakukan suatu kajian khusus dalam menelusuri potensi dan peluang yang ada dari suatu kerjasama.

Penelitian Umi Zakiah berjudul *Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Membangun Infrastruktur Kota Bandar Lampung ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010-2017*, menegaskan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang penting bagi Pendapatan Asli Daerah (Umi Zakiah, 2019). Meskipun penelitiannya baru terbatas pada kota Bandar Lampung, dimana Zakiah secara kuantitatif menemukan hubungan dan pengaruh signifikan agregat jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitiannya, Zakiah merumuskan saran bagi Pemerintah Daerah Lampung untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik bagi pengembangan sektor pariwisata, salah satunya dengan melengkapi fasilitas-fasilitas yang terdapat pada objek wisata dan infrastruktur seperti jalan raya menuju destinasi wisata. Hal tersebut dimaksudkan supaya dapat meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan. Selain itu, Zakiah menyimpulkan bahwa penambahan jumlah objek wisata yang menarik akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan terhadap objek wisata, hotel, dan restoran, sehingga akan berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Pragustian Saputra (2018) pada sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata. Ditinjau dari objek penelitiannya, temuan Saputra sangat relevan terhadap pokok pembahasan dalam tulisan ini mengingat Kabupaten Lampung Selatan memiliki wisata bahari (wisata pantai) yang tersebar di beberapa kecamatan dan beberapa daerah wisatanya terkenal hingga mancanegara, dimana sampai dengan tahun 2017 saja data yang ada menunjukkan objek wisata bahari Lampung Selatan sebanyak 25 objek. Dari penelitian Zakiah dan Saputra ini, dapat direfleksikan bahwa pengembangan destinasi wisata akan mendorong performa dan pertumbuhan ekonomi daerah yang distimulus melalui peningkatan aktifitas pariwisata dari berbagai faktor produk dan jasa yang meliputinya. Seharusnya penegasan urgensi pengembangan sektor pariwisata ini menjadi motivasi yang tinggi bagi aktor Sub-nasional terutama Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif mengumpulkan berbagai sumber potensial yang dapat menunjang pengembangan sektor pariwisata termasuk dengan melakukan inisiasi kerjasama internasional.

Penelitian oleh Victoria Lelu Sabon berjudul *Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada ASEAN Economic Community (AEC)*, secara kualitatif, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor pariwisata Indonesia dalam menghadapi AEC, yaitu strategi pemasaran, strategi pendanaan, strategi pembangunan infrastruktur, serta kebijakan sektor pariwisata. Dalam penelitian ini, Bali masih menjadi tujuan destinasi wisata yang prioritas bagi wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia. Kontribusi penelitian ini yaitu faktor-faktor strategi pemasaran, strategi pendanaan, strategi pembangunan infrastruktur, serta kebijakan sektor pariwisata berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) selama tahun 2010-2016 (Sabon et al., 2018). Dari temuannya, Sabon merekomendasikan supaya dilakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung aksesibilitas wisatawan. Selain itu, Sabon menekankan indikator *natural and cultural resource*, supaya pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan kebudayaan demi tercipta keberlanjutan lingkungan dan budaya. Sebagaimana juga yang disarankan oleh Sabon, peneliti menyetujui bahwa salah satu kelemahan pariwisata Indonesia hari ini adalah pasifnya para pelaku dan pegiat industri pariwisata dalam melakukan kegiatan promosi pariwisata melalui media sosial (twitter, path, instagram, dan lainnya.) padahal pemanfaatan media sosial tersebut

tidak memerlukan biaya besar. Jika Sabon merujuk prinsip dan norma pada semangat *ASEAN Economic Community* untuk mendorong daya saing pariwisata Indonesia di pasar ASEAN melalui strategi yang ditingkatkan, peneliti sebaliknya justru tertarik untuk mengangkat potensi dan daya saing pariwisata daerah Lampung sebagai Sub-Nasional melalui penelusuran inisiasi kerjasama luar negeri dalam hal ini Pemerintah Australia.

Senada dengan pembahasan dalam tulisan ini, kajian terdahulu oleh Khairunnisa Simbolon berjudul *Potensi dan Tantangan Paradiplomasi Bandar Lampung*, telah sekilas memaparkan tentang potensi sekaligus menerawang tantangan kerjasama luar negeri Bandar Lampung. Dalam tesisnya, Simbolon menggaris bawahi potensi Lampung dengan jumlah populasi yang besar dan beberapa komoditas unggul yang berkontribusi pada kinerja ekonomi Lampung, secara khusus Lampung menyumbang nilai ekspor sebesar 4.837,14 juta dollar, dan nilai impor sebesar 2.217,03 juta dollar. Dalam paparannya, Simbolon bersepakat bahwa Lampung juga memiliki potensi sektor pariwisata yang dapat dikembangkan. Meskipun turut terdampak pandemi Covid-19, industri perhotelan dapat tetap tumbuh dari sebanyak 118 hotel pada tahun 2020, meningkat menjadi 133 hotel pada tahun 2022 (B. Lampung, n.d.). Tantangan yang ditekankan oleh Simbolon terkait paradiplomasi Bandar Lampung adalah permasalahan lingkungan terkait pengelolaan sampah, masalah limbah, dan polusi, selain itu juga, Pemerintah Lampung perlu merumuskan kepentingan-kepentingan yang akan dicapai melalui skema kerjasama luar negeri atau paradiplomasi (Simbolon, 2022). Perbedaannya dengan penelitian terdahulu ini, peneliti melihat Lampung sebagai daerah/Sub-nasional dengan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan namun memiliki tantangan yang krusial, secara khusus peneliti mengkaji Lampung sebagai Sub-nasional jika disandingkan dengan Australia dalam konteks kerjasama internasional di sektor Pariwisata.

Lampung saat ini masih menjadi wilayah strategis antara Pulau Jawa dan Sumatera di Indonesia. Sebagai wilayah perlintasan yang penting dari Negara Indonesia, Lampung memiliki peluang untuk menjadi salah satu koridor pariwisata. Selain itu, Lampung memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik, terutama destinasi wisata pantai. Dengan berbagai potensi pariwisata yang ada, sayangnya sampai dengan saat ini belum mampu menjadikan Lampung sebagai destinasi prioritas, baik secara domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisa potensi dan tantangan Sub-nasional Lampung dalam inisiasi kerjasama dengan Pemerintah Australia pada sektor pariwisata. Mengingat berbagai potensi yang telah dipaparkan di atas dan fakta bahwa Pemerintah Australia melalui Sekretaris I Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Australia Mark King pernah melakukan pertemuan secara resmi kepada Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim pada tahun 2019 (antaranews.com, 2019). Selain itu, Australia dan Lampung sebelumnya telah melakukan kerjasama perdagangan dan pengembangbiakan Sapi impor asal Australia. Argumentasi utama penelitian ini adalah Pemerintah sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah perlu menginisiasi kerjasama luar negeri untuk menstimulasi peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah pada sektor pariwisata. Oleh karenanya Pemerintah harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada dan mengantisipasi serta mengatasi hambatan dan tantangan yang menghalangi terimplementasinya inisiasi kerjasama luar negeri.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratori, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam (Neuman, 2017) terkait fenomena stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah Lampung dilihat melalui kacamata inisiasi kerjasama luar negeri Lampung-Australia di sektor Pariwisata. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan literatur, serta wawancara. Selain menghimpun dan menganalisa data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen, laporan, berita, informasi baik dari sumber cetak, buku,

maupun dari laman website resmi pemerintah dan sumber online lain yang terpercaya, penelitian ini juga bertumpu pada data primer yang didapatkan melalui wawancara sumber utama yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung. Kedua jenis data yang diperoleh akan menjadi deskripsi terkait peluang dan tantangan kerjasama Subnasional Lampung dengan Australia pada sektor Pariwisata. Analisa tentang Peluang dan Tantangan ini akan menjadi kajian awal untuk melihat lebih kritis dan mendalam potensi inisiasi kerjasama antara Lampung-Australia dalam sektor Pariwisata.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pariwisata Unggulan Pesisir Barat dan Pesisir Selatan Lampung

Lampung memiliki tujuh kawasan wisata unggulan yang tertuang di dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPDA) Provinsi Lampung tahun 2012 sampai dengan tahun 2031. Tujuh kawasan wisata unggulan tersebut diantaranya a) Kawasan Wisata Unggulan Kota Bandar Lampung, mulai dari kawasan wisata di jalur lintas Barat yang mencakup Gedungtataan-Rantau Tijang-Kota Agung-Wonosobo-Sangga-Bengkunat-Biha-Krui-Simpang Gunung Kemala Pugung Tampak sampai dengan perbatasan Provinsi Bengkulu; b) Kawasan Wisata Unggulan Krui dan Pantai Tanjung Setia terletak di Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan; c) Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Way Kambas, meliputi: kawasan suaka alam dataran rendah dengan luas \pm 1300 km, melintasi daerah perkebunan Bergen dan Situs Purbakala Pugung Raharjo, perkebunan lada serta perkampungan asli Lampung; d) Kawasan Wisata Unggulan Teluk Kiluan mulai dari gugusan Cengkalik ke arah Selatan sampai ke Cuku Kementara; e) Kawasan Wisata Unggulan Gunung Krakatau dan Pulau Sebesi yang terletak di Selat Sunda termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan; f) Kawasan Wisata Unggulan Bakauheni dan Menara Siger yang merupakan icon Lampung dan sebagai titik nol jalan lintas Sumatera (pintu gerbang Pulau Sumatera); dan g) Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang membentang dari ujung Selatan Provinsi Lampung bagian Barat hingga berbatasan dengan bagian Selatan Provinsi Bengkulu. Salah satu Kawasan Wisata Unggulan adalah Kawasan Wisata Unggulan Krui dan Pantai Tanjung Setia yang terletak di Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan. Selain itu terdapat juga Pantai Labuhan Jukung yang berada di Kota Krui. Rangkaian wisata pantai ini digemari oleh wisatawan asing karena gelombang tingginya yang dapat digunakan untuk wisata *surfing*. Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi yang unggul pada sektor pariwisata khususnya Wisata Kepesisiran.

Jenis pariwisata kepesisiran dapat memanfaatkan potensi gelombang, pantai, rata-rata pasang-surut baik berupa rata-rata lumpur maupun rawa payau serta wilayah-wilayah yang secara morfogenesis pembentukannya masih dalam pengaruh aktivitas *marine* (Seli & Christanto, n.d.). Wisata kepesisiran yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat yang potensial diantaranya Pantai Kempring, Pantai Labuhan, Pantai Pasar Ulu, Pantai Labuhan Jukung, Pantai Seray, Pantai Pantai Way Redak, Pantai walur, Pantai Lintik, Pantai Padang Haluan, Pantai Andai Berandai, Pantai Tanjung Setia, Pantai Melasti, Pantai Labuhan Ngambur, Pantai Mandiri, dan Pantai Tembakak (Way Sindi) (Seli & Christanto, n.d.).

Dari banyaknya wisata pantai yang potensial di Pesisir Barat. Ada empat pantai yang digemari pengunjung diantaranya dipaparkan sebagai berikut:

1. Pantai Tembakak (Pantai Way Sindi)

Nama lain dari Pantai Tembakak adalah Pantai Way Sindi. Pantai ini berlokasi di Desa Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Lokasi ini dapat diakses melalui Jalan Lintas Barat

Sumatera. Pantai ini juga dapat diakses dari pusat kota Krui melalui jalan lintas menuju ke arah Provinsi Bengkulu (arah utara).

Pantai ini memiliki pasir berwarna hitam yang menarik. Di sekitar bibir pantainya ditumbuhi oleh barisan pohon kelapa yang berbeda dari pantai-pantai lain di Kabupaten Pesisir Barat yang pada umumnya berpasir putih. Daya tarik lain ditunjukkan dengan adanya batu-batu besar hitam di sekitar pantai. Pantai ini juga merupakan pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Pisang. Batu-batu karang yang besar di Pantai tersebut juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para pencinta fotografi.

2. Pulau Pisang

Pulau Pisang merupakan Pulau Kecil berpenghuni yang telah resmi menjadi kecamatan sejak tahun 2012. Luas Pulau ini yaitu 43,61 km². Beberapa objek wisata yang di Pulau Pisang diantaranya wisata Sumur Putri Way Bah Anjung, Batu Gurih, dan Batu Tiga. Menurut masyarakat setempat Sumur Putri Way Bah Anjung merupakan air sumur yang terletak di dataran tertinggi di Pulau Pisang yang diyakini oleh masyarakat sebagai tempat pemandian dewa-dewi. Menurut kepercayaan masyarakat setempat orang yang mandi di air sumur ini akan menjadi awet muda dan dapat menghilangkan segala jenis penyakit. Hal unik lain dari sumur ini yaitu air sumur ini tidak pernah surut meskipun pada musim kemarau.

Sementara Pantai Batu Gurih merupakan Pantai dengan Pasir Putih, dan terdapat banyak batu besar seperti di Pantai Tembakak. Di pantai ini terdapat kapal yang terdampat sejak puluhan tahun yang lalu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di Pulau Pisang juga terdapat Pantai Batu Tiga, yakni terdapat tiga buah batu besar yang berdiri tegak di bibir pantai dikelilingi oleh batu-batu kecil sehingga menambah daya tarik tersendiri dari pantai ini. Hal menarik lain di destinasi wisata ini adalah kehidupan sosial budaya masyarakat Lampung yang tinggal di Pulau Pisang yang menjadi daya tarik dari nilai kesejarahannya.

3. Pantai Labuhan Jukung

Pantai ini merupakan salah satu pantai yang terletak di Pusat Kota Krui, Ibukota Kabupaten Pesisir Barat. Pantai Labuhan Jukung memiliki akses yang paling baik diantara pantai-pantai yang lainnya. Pantai ini berpasir putih, dengan keindahan Ombak yang cocok dimanfaatkan sebagai lokasi surfing. Selain itu, Pantai ini wisatawan dapat menyaksikan keindahan sunset.

4. Pantai Tanjung Setia

Pantai Tanjung Setia berlokasi di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan. Pantai Tanjung Setia lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Pantai Karang Ngimbor. Karang Ngimbor berarti batu karang yang menyiram air. Pantai Tanjung Setia telah dikenal baik oleh wisatawan mancanegara. Pantai Tanjung Setia pernah mendapatkan penghargaan sebagai pantai dengan keindahan ombak terbaik nomor tiga di dunia untuk selancar (surfing) Ombak pantai Tanjung Setia rata-rata mencapai ketinggian 3-5 meter dengan panjang ombak mencapai 200 meter.

Selain objek wisata pantai bergelombang tinggi yang disukai para turis mancanegara. Pesisir Barat juga memiliki potensi wisata historis. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tengah akan mengembangkan objek wisata sejarah “Makam Patih Gajah Mada” (Pesisir Barat, n.d.). Pengembangan yang dilakukan termasuk mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas, sehingga lokasi wisata layak untuk dikunjungi dan memiliki penambahan nilai. Wisata historis ini pun memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang menyukai jenis wisata budaya dan nilai tradisionalisme.

B. Alur Inisiasi Kerjasama Lampung-Subnasional Luar Negeri

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi yang telah dilakukan kepada Biro Otonomi Daerah dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada 05 Agustus 2022 yang diwakili oleh RS (Analisis Kebijakan) dan KH (Kepala Bagian Kerjasama), diketahui prosedur atau alur yang dapat dilakukan dalam suatu inisiasi kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah/Sub-nasional. Inisiasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan subnasional Luar negeri dapat dilalukan dengan dua bentuk yakni 1) sebagai

penerusan dari kerjasama Pemerintah Pusat, 2) sebagai inisiasi wilayah/Pemerintah Daerah atas persetujuan Pemerintah Pusat. Inisiasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Subnasional di Luar Negeri yang merupakan penerusan kerjasama Pemerintah Pusat, biasanya juga merupakan bagian dari program kerja nasional. Dimana daerah memiliki peran dan kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian program kerja tersebut. Sementara kerjasama yang merupakan inisiasi Wilayah/Pemerintah Daerah sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, tujuan pembangunan daerah, serta kajian potensi dan peluang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak terkait.

Untuk melakukan kerjasama internasional tersebut setidaknya terdapat tiga syarat diantaranya:

1. Persamaan status wilayah

Wilayah atau Pemerintah Daerah terkait harus memiliki status wilayah yang sama. Apabila suatu daerah merupakan Provinsi atau Wilayah bagian, maka subnasional Luar negeri terkait harus juga merupakan Provinsi atau Wilayah bagian. Apabila suatu daerah merupakan Kota, maka subnasional Luar Negeri terkait harus juga merupakan Kota. Demikian juga apabila suatu daerah merupakan Desa, maka subnasional Luar Negeri terkait juga harus berstatus Desa. Hal ini berkaitan dengan derajat kewenangan dan aspek politik yang terdapat diantaranya keduanya. Derajat kewenangan dan aspek politik ini sangat penting, karena akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi sebuah perjanjian kerjasama pada suatu wilayah Pemerintahan. Dalam tata kelola pemerintah Provinsi, kewenangan yang dapat dilakukan dapat hanya terbatas pada fasilitasi. Sementara realisasi dan tindak lanjut bergantung pada kewenangan dan kebijakan daerah otonom seperti Kabupaten, Kota, atau Desa.

2. Memiliki Hubungan Diplomatik antar Daerah

Hubungan diplomatik ini merupakan syarat penting untuk dilakukannya suatu inisiasi kerjasama internasional. Baik hubungan diplomatik yang telah berjalan sebelumnya melalui struktur Pemerintah Pusat maupun hubungan diplomatik yang telah terjalin antar subnasional itu sendiri. Meskipun hubungan diplomatik ini tidak selalu ditandai dengan berdirinya kantor perwakilan dari Pemerintah Wilayah tersebut pada Sub-nasional terkait di luar negeri. Hubungan diplomatik dapat menjadi dasar yang kuat bagi suatu Pemerintah Daerah atau Sub-nasional untuk memulai kerjasama dan perluasan Paradiplomasi.

3. Bidang yang dipilih dalam Kerjasama

Beberapa bidang yang dapat dijangkau dalam inisiasi kerjasama antar subnasional antara lain bidang Tata kelola Pemerintahan, Sosial Budaya, IPTEK, dan bidang lain tentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang (Peraturan dan Konstitusi Subnasional/Wilayah terkait). Secara konstitusional, acuan inisiasi kerjasama antar subnasional berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 363 tentang Kerjasama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2020, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 tentang Pedoman Hubungan Luar Negeri Pemerintah Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 363 tentang Kerjasama Daerah disebutkan bahwa kerjasama internasional oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah memuat pengertian dan petunjuk teknis kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri dapat berupa kerjasama antar Pemerintah Subnasional dan atau kerjasama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah memuat tentang tata laksana dan operasionalisasi kerjasama internasional oleh Pemerintah Daerah. Sementara pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 tentang Pedoman Hubungan Luar Negeri Pemerintah

Daerah memuat panduan dan standar pelaksanaan kerjasama internasional termasuk di dalamnya adalah keprotokoleran dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia dalam kerjasama Luar Negeri.

Secara umum alur inisiasi kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan sebagai berikut:

1. *Menelusuri data potensi dan manfaat kerjasama*

Bagian terpenting dari inisiasi kerjasama adalah mengkaji potensi dan manfaat yang akan didapatkan oleh Pemerintah Daerah dan Subnasional terkait. Terutama manfaat kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanah pada Undang-Undang pasal 363 ayat 1. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Subnasional di Luar Negeri harus dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan daerah, bermanfaat terhadap penyediaan layanan publik yang lebih efisien mana kala dikelola bersama, serta meningkatkan kerjasama dan hubungan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang pasal 367 disebutkan bahwa kerjasama daerah dengan Lembaga dan atau pemerintah daerah di luar negeri dapat meliputi:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan
- e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke Sumber Daya Manusia Indonesia atau kemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah terkait. Di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri pada Bab IV tentang mekanisme Hubungan Kerja sama, dalam bidang tertentu oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan pada kerja sama Ekonomi Sub Regional (KESR); kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing (ormas asing); pengiriman misi ekonomi, sosial dan budaya dari dan ke luar negeri; dan kerja sama dengan perwakilan negara asing atau organisasi internasional di Indonesia.

2. *Melakukan Penjajakan*

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25, penjajakan dilakukan dengan mekanisme:

- a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
- b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
- d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke daerah.

Dalam melakukan Penjajakan, Pemerintah Daerah juga dapat meminta informasi yang relevan melalui Kementerian Dalam Negeri kepada Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Luar Negeri dan/atau Perwakilan RI.

3. *Melakukan Kajian komprehensif tentang kerjasama*

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah dan atau Lembaga di Luar Negeri terdiri atas kerja sama provinsi kembar/bersaudara; kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan kerja sama lainnya. Setelah dilakukannya suatu penjajakan kerja sama, maka perlu dirancang rencana kerja sama yang setidaknya memuat subjek kerja sama; latar belakang kerja sama; maksud, tujuan, dan sasaran kerja sama;

objek kerja sama; ruang lingkup kerja sama; sumber pembiayaan; dan jangka waktu pelaksanaan kerja sama.

Rencana kerja sama tersebut kemudian akan dilakukan peninjauan selanjutnya persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Apabila disetujui oleh DPRD, maka rancangan rencana kerja sama tersebut disampaikan kepada Menteri oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pertimbangan dan verifikasi. Pada tahap ini Menteri terkait akan melakukan koordinasi bersama jajaran kementerian dan lembaga pemerintah terkait lainnya untuk selanjutnya memutuskan persetujuan.

4. *Adanya fasilitasi oleh Kementerian terkait*

Dalam inisiasi kerjasama antar subnasional, terdapat beberapa kementerian terkait diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian lain terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan. Kepala Daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

5. *Peningkatan derajat lanjutan pada terbentuknya kesepakatan antara dua pihak (Letter of Intent)*

Dalam hasil peninjauan dapat ditindaklanjuti dengan dilakukannya pernyataan kehendak kerjasama antara dua pihak (*Letter of Intent*). Kepala daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama. Sebagai tindak lanjut peninjauan yang positif, Pemerintah Daerah dapat menyusun Pernyataan Kehendak Kerja Sama dengan berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang ditembuskan kepada Sekretariat Jenderal dan Kementerian Luar Negeri, serta kepada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan Direktorat Jenderal yang menangani hubungan bilateral dengan negara terkait, sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.

6. *Kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding)*

Tahap ini merupakan tahap yang menunjukkan bahwa kerja sama telah melangkah menuju tingkat yang lebih serius menjelang realisasi kerja sama. Pada tahap ini kedua belah pihak telah bersepakat untuk menerbitkan suatu naskah kerja sama. Naskah tersebut merupakan dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.

7. *Realisasi kerjasama*

Di dalam pelaksanaan kerjasama, terdapat proses pembinaan dan pengawasan yang secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Sementara di tingkat Pemerintah Daerah, pembinaan dan pengawasan Kerja sama dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

C. Peluang Kerjasama Luar Negeri Lampung-Australia

Pada dasarnya, inisiasi kerjasama akan lebih mudah dilakukan dengan mitra yang sebelumnya telah menjalin kerjasama. Australia pernah memiliki kerjasama dengan Lampung pada sektor perdagangan yakni kerjasama impor sapi dan pengembangan bibit sapi unggul (Pemprov, n.d.). Australia merupakan negara asal impor terbesar ke Lampung khususnya pada komoditas sapi bakalan (B. A. Lampung, 2020). Total investasi Australia dalam sektor peternakan dan perkebunan terintegrasi di Lampung mencapai US\$30 juta sampai US\$50 juta (Jati, 2016). Australia juga menjadi negara tujuan ekspor komoditas pertanian asam kandis Lampung (Pertanian, n.d.). Australia melalui Sekretaris I Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Australia

Mark King, pernah melakukan pertemuan bilateral resmi kepada Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim pada 8 Juli 2019. Di dalam pertemuan tersebut dilakukan peninjauan tentang potensi kerjasama yang dapat dilakukan di antara kedua Pemerintah di sektor ekonomi termasuk pariwisata. Secara langsung Mark King menyampaikan pembahasan kerjasama bidang perdagangan, dan peninjauan untuk membuka kerjasama di bidang Pariwisata terutama pada destinasi wisata surfing di Pesisir Barat dan diving di Teluk Lampung, Pahawang.

Pada kesempatan diskusi dan wawancara dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, diketahui bahwa peninjauan kerjasama tersebut belum berlanjut mengingat kajian strategis tentang potensi kerjasama, termasuk manfaat, konsekuensi dan pertimbangan resiko belum memberikan rekomendasi keberlanjutan peninjauan kerjasama. Meskipun Pemerintah dalam hal ini Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pun mengakui adanya potensi yang dapat dikembangkan pada destinasi wisata Pesisir Barat dan Teluk Lampung untuk menerima wisatawan mancanegara, terutama yang berasal dari Australia.

RS menerangkan bahwa,

“kewenangan tentang eksekusi dan implementasi kerjasama antara Pemerintah Daerah atau suatu wilayah dengan luar negeri ada pada otoritas setempat, sehingga dalam konteks potensi kerjasama pengembangan wisata Pesisir Barat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah/Bupati Kabupaten Pesisir Barat.”(RS, Analisis Kebijakan Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Wawancara pada 05 Agustus 2022 di kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).

RS juga menjelaskan terkait peninjauan investasi pariwisata yang pernah ditawarkan oleh Pemerintah Australia pada destinasi wisata di Pesisir Barat, terhambat juga pada faktor kepemilikan lahan dan wilayah yang masih banyak dikelola secara individu, sehingga Pemerintah tidak berwenang atas itu. Selain itu, kesadaran masyarakat setempat yang masih minim terkait dengan pengembangan wisata berbasis pada perspektif pembangunan daerah/wilayah, melainkan masih berorientasi pada profit dan kemanfaatan bagi individu.

Dari wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam peninjauan kerjasama Lampung-Australia belum didapatkan adanya kepentingan daerah setempat sekaligus belum adanya sinergi dan kesepahaman tentang urgensi dari kerjasama tersebut, sehingga Pemerintah belum memutuskan untuk melanjutkan peninjauan kerjasama tersebut. Mencermati realita tersebut, tidak ada proses pengambilan keputusan disini, sebagaimana Graham T. Alison (1971) dan David Easton (1965) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan di dalam pendekatan domestik dalam konteks kajian intermestik dapat dipengaruhi oleh pusat kekuasaan/negara (model institusional), hasil kompetisi kepentingan antar kelompok yang berbeda (model pluralis), sistem, tuntutan struktural, dan kelompok sosial (model sistem), pertimbangan rasional secara ekonomi (model rasional), atau konsensus dinamis *networks*/jaringan elemen dan *technopols*/para ahli profesional (model koalisi advokasi). Jika suatu kepentingan daerah tertentu sulit diputuskan, pertanyaan yang muncul adalah maka simpul-simpul pengambilan kebijakan yang mana yang seharusnya dapat dioptimalkan. Harus ada aktor dominan yang dapat memfasilitasi terjadinya konsensus dan perembukan pengambilan keputusan strategis tersebut.

Meskipun kerjasama *Government to Government* antara Lampung-Australia masih mengalami kendala, potensi kerjasama dari pihak *non-government* masih ada dari kalangan masyarakat. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung pernah melakukan peninjauan bersama Keduatahan Besar Australia untuk Indonesia pada tahun 2019 (Suryanto, 2019). Hipmi Lampung memaparkan potensi investasi di Lampung untuk berbagai sektor. Termasuk kunjungan anggota *Australian Rural Leadership Program* ke Lampung untuk menjajaki potensi kerjasama di Lampung (Kupas Tuntas, 2019). Pemerintah dapat menangkap indikator keterlibatan aktor non-pemerintah ini sebagai gejala polaritas baru dalam interaksi global yang dapat dioptimalkan untuk sinergitas mendukung inisiasi kerjasama luar negeri. Daniel

Gorman (2017) menyebut fenomena tersebut sebagai *international functional and technical cooperation*, dimana aktor non-pemerintah semisal para ilmuwan, akademisi, teknokrat, profesional, dan korporasi multinasional melakukan penjajakan dan inisiasi kerjasama luar negeri/internasional secara inisiatif dan independen.

Sidik dalam penelitiannya mendapati ada beberapa faktor kegagalan kerjasama antar pemerintah provinsi Lampung dengan pemerintah provinsi negara lain, diantaranya keterbatasan anggaran, perbedaan sistem hukum yang berlaku di kedua pihak sub-nasional, dan adanya aturan proteksi subnasional di luar negeri yang membatasi. Selain faktor tersebut, juga masih terdapat keraguan pada sebagian aparaturnya terkait keberhasilan kerjasama yang diinisiasi, masih minimnya ide dan inisiasi tentang gagasan kerjasama, kurangnya koordinasi antara pemerintah kota/kabupaten dengan provinsi, lemahnya sistem dan kebijakan, serta belum adanya database/referensi negara tujuan kerjasama (Sidik, 2019).

D. Tantangan Inisiasi Kerjasama Luar Negeri

Terdapat hambatan dalam perjalanan inisiasi kerjasama Luar Negeri yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Lampung, ditemukan beberapa kendala dan tantangan. Kendala dan tantangan tersebut dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Dari hasil wawancara dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, beberapa tantangan diantaranya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Otonomi Kewenangan

Adanya distribusi kewenangan bagi Pemerintah Daerah memberikan tantangan tersendiri dalam inisiasi kerjasama luar negeri. Distribusi kewenangan tersebut dibatasi pada wilayah, otoritas pengambilan keputusan, dan alokasi pengelolaan sumber daya. Selain itu juga, Pemerintah Daerah dalam hal ini pada sistem pemerintah desentralisasi, tetap merujuk dan berpatokan pada Pemerintah Pusat. Sehingga pelaksanaan pengambilan keputusan, prosedur implementasi kebijakan, dan pengejawantahan inisiasi kerjasama luar negeri memerlukan sinergitas lintas struktur pemerintah dan lembaga terkait.

“Dalam keputusan inisiasi kerjasama juga kita harus melewati persetujuan dari Pemerintah Pusat, sehingga harus disiapkan kajian yang matang.”(RS, Analisis Kebijakan Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Wawancara pada 05 Agustus 2022 di kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).

Keterpakuan otonomi kewenangan Pemerintah Daerah pada proses desentralisasi kepada pemerintah pusat seharusnya tidak menghalangi para aktor strategis untuk melakukan improvisasi dan kajian komprehensif dalam merencanakan dan merealisasikan inisiasi kerjasama luar negeri. Apalagi jika telah terbaca adanya potensi daerah untuk bergerak ke arah lebih maju. Gejala tidak progresnya inisiasi dan *political will* para pemangku kebijakan dalam *case* ini hampir mirip dengan indikasi kegagalan output (*output failure*) yang disebut oleh David Easton (1965). Indikasi tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa tanda, diantaranya disaat otoritas gagal dalam mengambil tindakan untuk mempertemukan berbagai tuntutan, kebutuhan, dan kepentingan dari banyak elemen pada sistem yang ada. Selain itu dapat juga terjadi pada kondisi dimana otoritas telah mengambil suatu tindakan penting yang diinterpretasi sebagai respon dan tanggapan terhadap suatu tuntutan, kebutuhan, dan kepentingan. Sayangnya, tindakan yang diambil pada faktanya didasarkan pada pengaruh dan pertimbangan aktor lain yang justru berseberangan pada kepentingan yang diinginkan. Jadi keduanya sama saja menghasilkan *zero output*.

2. Keterbatasan Hak Olah lahan oleh Pemerintah Daerah

Hak pengelolaan Lahan atau wilayah sangat terbatas bagi Pemerintah Daerah. Mengingat wilayah strategis dan potensial pada beberapa destinasi wisata merupakan wilayah yang kepemilikannya adalah oleh masyarakat/individu, sehingga Pemerintah dalam hal ini tidak memiliki kewenangan besar. Sementara masyarakat dalam pemanfaatan lahan tersebut pun belum secara optimal dan belum tepat guna.

“dalam pengelolaan lahan untuk destinasi wisata itu, setiap yang punya masih sebatas mementingkan profit pribadi, belum sampai pada pembangunan daerah secara kolektif” .”(RS, Analisis Kebijakan Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Wawancara pada 05 Agustus 2022 di kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).

3. Dampak Pandemi Covid-19

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap berbagai sektor kehidupan tidak dapat dipungkiri, terlebih bagi sektor Pariwisata. Sebelum pandemi, perjalanan wisata tidak terhambat oleh jarak destinasi dengan tersedianya berbagai fasilitas dan infrastruktur. Akan tetapi, pandemi Covid-19 yang mengharuskan aktivitas dilakukan dengan pembatasan interaksi, serta adanya kebijakan *social distancing* bahkan pembatasan skala besar seperti *lockdown*, sangat berpengaruh terhadap berbagai jenis kegiatan pariwisata. Mengingat pariwisata sangat erat dengan unsur hiburan yang memungkinkan terjadinya kerumunan dan keramaian.

Salah satu hambatan nyata sebagai dampak pandemi adalah ditutupnya berbagai koridor perjalanan antar wilayah, termasuk perjalanan luar negeri (*travel corridor*). *Travel Corridor* antara Lampung dan jalur perjalanan Australia pun masih belum ada/masih tertutup. Mengingat masih dilakukan protokol dan prosedur pengendalian penyebaran virus Covid-19 dengan berbagai variannya. Hal ini menjadi hambatan yang krusial dalam membangkitkan kembali geliat Pariwisata Daerah Lampung bagi wisatawan Mancanegara terutama yang berasal dari Australia.

“Salah satu hambatan saat ini adalah masih ditutupnya *travel corridor* Australia-Indonesia, sehingga berdampak pada kedatangan turis asing, ini juga menjadi pertimbangan” . (RS, Analisis Kebijakan Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Wawancara pada 05 Agustus 2022 di kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).

4. Cost Implementation

Pelaksanaan kerjasama luar negeri memerlukan kesiapan tata kelola, manajemen, dan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung. Dalam wawancara RS menyampaikan bahwa Pemerintah Lampung masih mengalami hambatan dalam porsi anggaran kerjasama luar negeri.

“Dalam implementasi kerjasama luar negeri level komitmen yang dibangun adalah pada tata kelola yang ideal, sehingga dalam implementasinya seringkali terkendala pada daya dukung anggaran.” (RS, Analisis Kebijakan Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Wawancara pada 05 Agustus 2022 di kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).

5. Kesiapan Masyarakat

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat identik dengan *hospitality*. Budaya merupakan hal terkait sangat erat di dalamnya. Dalam pengelolaan Pariwisata Daerah yang berdaya saing internasional, seringkali terbentur pada kesiapan masyarakat. Belum terbangunnya kesadaran dan budaya yang mendukung di masyarakat, sehingga faktor kenyamanan bagi wisatawan sebagai faktor utama dalam aktivitas pariwisata, seringkali terabaikan.

“Masyarakat seringkali masih memahami pariwisata sebagai ruang bisnis yang insidental, sehingga pengelolaannya terbatas pada orientasi profit jangka pendek. Selain itu, masyarakat terkadang masih mengedepankan ego sektoral dimana hanya kepentingan sekelompok kecil saja atau justru kepentingan individu saja yang dipedulikan.” (RS, Analisis Kebijakan Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Wawancara pada 05 Agustus 2022 di kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu proses edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat. Mengingat masyarakat merupakan pelaksana dan pegiat langsung aktivitas Pariwisata

apa pun jenis wisatanya dan dimana pun destinasi atau objek wisata yang dikembangkan. Salah satu entitas penting yang perlu mendapat perhatian adalah kalangan atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dimana Pokdarwis ini dapat menjadi corong edukasi dan pendampingan kepada masyarakat secara lebih luas. Untuk wilayah Pesisir Barat berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, memiliki sebanyak 8 Pokdarwis berdasarkan data tahun 2021 (Wawancara kepada Kepala Bidang Kerjasama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung di ruang kerjanya pada 18 Juli 2022). Keberadaan Pokdarwis ini menjadi modal yang penting dalam peningkatan daya saing dan pengembangan pariwisata daerah.

Salah satu contoh praktik paradiplomasi Kota di Indonesia yang berhasil mengangkat potensi lokal dalam inisiasi paradiplomasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dimana faktor budaya masyarakat justru menjadi pendorong keberhasilan paradiplomasi yang dilakukan. Semarang menjadi wilayah dengan interaksi para pendatang dan pribumi yang plural sehingga disebut sebagai *melting point of Cultures*, terdapat percampuran berbagai budaya lokal dan internasional diantaranya Jawa, Arab, China, dan Belanda. Akulturasi budaya China dan Jawa memberikan dampak dominan terhadap perkembangan budaya *Semarangan*. Contohnya dapat terlihat pada kuliner loempia (lumpia), kue moci, babad, dan lontong cap go meh. Termasuk arsitektur Sam Poo Kong dan Kampung Pecinan. Paradiplomasi pariwisata Semarang diimplementasikan melalui program MICE (*Meetings, Incentives, Conference, and Events*), dimana melalui program tersebut dapat merevitalisasi objek wisata populer di Semarang. Pemerintah Semarang menyelenggarakan *Semarang Business Forum* (Sem'Biz) dan Semarang Pesona Asia, sebagai wadah dalam menarik para investor (Hermini et al., 2018).

6. Kesiapan Stakeholder

Kerjasama luar negeri untuk sektor Pariwisata akan terkait dengan stakeholder dan banyak elemen lain. Masih menjadi tantangan bagi pemerintah Lampung dalam memfasilitasi dan mensinergikan berbagai elemen yang ada. Pengakuan RS bahwa stimulus dan dukungan dari Pemerintah Lampung selama ini belum mendapat sambutan dan tanggapan yang antusias dari berbagai elemen dan stakeholder.

“Beberapa fasilitasi yang telah dilakukan dalam inisiasi kerjasama Pariwisata tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak terkait. Padahal telah ada beberapa Asosiasi Pariwisata di Lampung. Contohnya beberapa pameran usaha dan festival internasional yang ada, belum dimanfaatkan oleh masyarakat dan kalangan pebisnis” (RS, Analisis Kebijakan Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Wawancara pada 05 Agustus 2022 di kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).

Akan tetapi terkait alphanya *feedback* stakeholder menanggapi stimulus dan dukungan Pemerintah ini masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Apakah disebabkan karena faktor independensi stakeholder atau faktor lain yang menyebabkan antara elemen yang berkepentingan dan berkewenangan tidak saling membuat suatu konsensus bersama tentang inisiasi kerjasama luar negeri ini.

VI. Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, terutama di zaman modern dan era teknologi seperti sekarang ini, kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah penting dilakukan. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendorong percepatan Pembangunan Daerah. Inisiasi kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 363 tentang Kerjasama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2020, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 tentang Pedoman Hubungan Luar Negeri Pemerintah Daerah.

Penelitian ini meneukan bahwa Lampung telah memiliki beberapa pengalaman inisiasi kerjasama luar negeri, baik dengan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Dari pengalaman yang telah dilakukan ditemukan beberapa kendala dan tantangan yang dapat diantisipasi ke depannya untuk menjadi

pertimbangan dan panduan dalam inisiasi kerjasama luar negeri berikutnya. Mengingat potensi yang dimiliki Lampung untuk kerjasama luar negeri, perlu dilakukan secara berkelanjutan penyiapan dan tata laksana pemerintah yang baik, serta sinergitas bersama dengan berbagai stakeholder dan elemen lain. Australia sebagai salah satu mitra luar negeri yang potensial bagi Lampung. Tantangan krusial dalam inisiasi kerjasama sektor pariwisata Australia-Lampung adalah mempertemukan kesepahaman dan sinergi tentang urgensi kerjasama, selebihnya adalah terkait kesiapan tata kelola dan daya dukung materil maupun non-materil lainnya. Diperlukan gagasan, motivasi, dan inisiasi yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi dan mendorong realisasi keberlanjutan kerjasama. Kajian dan penelitian tentang kerjasama Pemerintah Subnasional dengan luar negeri atau saat ini populer dengan istilah paradiplomasi menjadi semakin mengemuka. Kesiapan multi-aktor dan stakeholder dalam berbagai bentuk kerjasama atau paradiplomasi Lampung juga menarik untuk menjadi kajian berikutnya.

Daftar Pustaka

- Allison, Graham T. & Philip Zelikow. (1999). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. New York: Longman.
- Antaraneews.com. (2019, July 8). *Pemprov Lampung dan Australia perluas kerja sama berbagai bidang*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/946777/pemprov-lampung-dan-australia-perluas-kerja-sama-berbagai-bidang>.
- Easton, David. 1965. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Gorman, Daniel. 2017. *International Cooperation in the Early Twentieth Century*. New York: Bloomsbury Academic.
- Handoko, E. (2021, January 28). *Kupas Tuntas—Dampak Pandemi Covid-19 di Sektor Pariwisata Lampung, Kunjungan Wisatawan Hanya Dua Juta Setahun*. <https://www.kupastuntas.co/2021/01/28/dampak-pandemi-covid-19-di-sektor-pariwisata-lampung-kunjungan-wisatawan-hanya-dua-juta-setahun>.
- Hermi, S., Nadia, F., Satwika, P., & Sheiffi, P. (2018). Decentralization in International Relations: A Study of Semarang City's Paradiplomacy. *E3S Web of Conferences*, 73, 09016. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187309016>.
- Jati, G. P. (2016, March 14). *Australia Siap Bangun Peternakan Rp1,6 T di Lampung dan Papua*. ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160314151652-92-117289/australia-siap-bangun-peternakan-rp16-t-di-lampung-dan-papua>.
- Khoiriah, S. (2023, January 24). *Wisata Bahari Jadi Tempat Favorit Wisatawan yang Berkunjung ke Lampung, Berikut Lokasinya*. Wisata Bahari Jadi Tempat Favorit Wisatawan Yang Berkunjung Ke Lampung, Berikut Lokasinya. <https://www.kupastuntas.co/2023/01/24/wisata-bahari-jadi-tempat-favorit-wisatawan-yang-berkunjung-ke-lampung-berikut-lokasinya>.
- Kupas Tuntas. (2019, April 29). *Belasan Pebisnis Australia Jajaki Investasi di Provinsi Lampung*. Belasan Pebisnis Australia Jajaki Investasi Di Provinsi Lampung. <https://www.kupastuntas.co/2019/04/29/belasan-pebisnis-australia-jajaki-investasi-di-provinsi-lampung>.
- Lampung, B. (n.d.). *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*. Retrieved March 14, 2023, from <https://lampung.bps.go.id/publication/2022/02/25/1a1b1feda4d8e6c095e9481b/provinsi-lampung-dalam-angka-2022.html>.
- Lampung, B. A. (2020, Oktober). *Pemprov Lampung Tawarkan Peluang Investasi dalam Ajang Indonesia Business Infrastructure Investment Forum 2020—Pemprov Lampung Tawarkan Peluang Investasi dalam Ajang Indonesia Business Infrastructure Investment Forum 2020*. Website Resmi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-tawarkan-peluang-investasi-dalam-ajang-indonesia-business-infrastructure-investment-forum-2020>.
- Lestari, R., Rachmawati, T., Kamandanu, F. A., & Syahrobi, D. (2021). *Lampung Tourism Supply During the Pandemic and Post Covid-19 Pandemic*. 78–86. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211206.012>.
- Neuman, W. L. (2017). *Understanding research* (Second edition). Pearson.
- Pemprov, H. (n.d.). *Pemprov Lampung—Australia Perluas Kerjasama Berbagai Bidang—Pemprov Lampung—Australia Perluas Kerjasama Berbagai Bidang*. Website Resmi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Retrieved February 5, 2023, from <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-australia-perluas-kerjasama-berbagai-bidang>.
- Pertanian, B. K. (n.d.). *MAKIN LARIS, ASAM KANDIS LAMPUNG DI PASAR AUSTRALIA DAN AMERIKA SERIKAT*. Retrieved March 15, 2023, from <https://karantina.pertanian.go.id/pers-1061-makin-laris-asam-kandis-lampung-di-pasar-australia-dan-amerika-serikat.html>.
- Pesisir Barat, D. P. (n.d.). *Bupati Pesisir Barat Akan Kembangkan Objek Wisata Sejarah "Makam Patih Gajah Mada"*; Kabupaten Pesisir Barat. Retrieved March 14, 2023, from <https://pesisirbaratkab.go.id>.
- Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit, P. C. S., & Pierre, W. C. D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada ASEAN Economic Community. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8(2), 163–176. <https://doi.org/10.15408/ess.v8i2.5928>.
- Seli, T. F., & Christanto, J. (n.d.). *IDENTIFICATION OF THE COASTAL TOURISM WITH COMMUNITY-BASED PREFERENCE IN PESISIR BARAT REGENCY OF LAMPUNG PROVINCE*. 10.
- Sidik, H. (2019). Paradiplomasi Lampung: Harapan dan Realitas. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 21(2), 201–216.
- Simbolon, K. (2022). POTENSI DAN TANTANGAN PARADIPLOMASI BANDAR LAMPUNG. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA*, 4(1), Article 1.
- Suryanto. (2019, July 9). *Bertemu Dubes Australia, Hipmi Tawarkan Investasi ke Lampung*. <https://radarlampung.co.id/>. <https://radarlampung.disway.id/read/183666/bertemu-dubes-australia-hipmi-tawarkan-investasi-ke-lampung>.
- Susana, I., Alvi, N. N., & Persada, C. (2017). PERWUJUDAN PARIWISATA BERKELANJUTAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DI PULAU PAHAWANG, PESAWARAN, PROVINSI LAMPUNG. *TATALOKA*, 19(2), 117. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.117-128>
- Umi Zakiah, F. (2019). *PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2010-2017*. UIN Raden Intan Lampung.

